

BAB II

KERANGKA TEORI

II.1. TINJAUAN PUSTAKA

Iqbal Aidar Idrus (2016) dengan Tesis yang berjudul “Peran Elite Lokal Dalam Kemenangan Partai Gerindra Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Luwu Utara”, dalam penelitiannya keberhasilan Partai Gerindra berhasil memperoleh suara terbanyak ke dua setelah Partai Golongan Karya dan mendapatkan jatah enam kursi menjadi anggota dewan karena didukung oleh tokoh masyarakat di Kabupaten Luwu Utara yang berasal dari golongan elit, seperti elit birokrat, elit ekonomi (pengusaha), dan elit politik mempunyai andil yang besar dalam menarik simpatisan masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Gerindra.

Pada penelitian ini terlihat masyarakat memilih calon bukan karena Partai, melainkan karena calon anggota dewan yang diusung Partai Gerindra mempunyai ketokohan di daerah pemilihannya masing-masing, apa lagi dengan kekuasaan dan

kekayaan yang di milikinya, di tambah dengan kehadiran tiga tokoh elit lokal yang menduduki posisi penting di partai, yaitu Indah Putri Indriani, Arsyad Kasmar dan Tahar Rum yang merupakan calon bupati pada saat Pilkada, yang mempunyai basis suara yang besar dan pendukung panatik di empat dapil Luwu utara.

Rasyid Pora (2014) dalam Tesisnya yang berjudul “Konflik elit dalam kontestasi kekuasaan internal partai politik (studi kasus pada DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara Tahun 2013)” menemukan tarikan kepentingan yang bervariasi (pemilukada, pileg, dan pilpres) jelang pergantian ketua DPW PAN Maluku Utara adalah titik awal lahirnya embrio konflik ditubuh partai secara internal. Kedua, Penyebab terjadinya konflik adalah akibat dari menguatnya sikap pragmatisme elit partai, seperti terjadinya perebutan kursi pimpinan partai, memanfaatkan posisi carateker, ketidakpatuhan terhadap norma partai serta intervensi DPP PAN terhadap proses Muswilub.

Ketiga, Konsekuensi logis atas konflik yang terbuka di internal partai adalah eksodusnya beribu-ribu kader partai

(termasuk kader potensial) ke partai lain. DPW PAN Maluku Utara pun gagal kembali pada pemilihan Gubernur Maluku Utara Periode 2013-2018 yang mengukung pasangan calon Muhajir-Sahrin. Hal lain yang juga ditemukan dari hasil penelitian ini adalah lemahnya politik akomodasi bagi Ketua Umum terpilih terhadap pihak yang kalah, sehingga eksistensi partai menjadi tergerus oleh menguatnya sikap antipati dari berbagai kalangan, termasuk pemilih atau masyarakat. Dalam konteks itulah, upaya penyelesaian konflik di DPW PAN Maluku Utara haruslah dilakukan dengan cara-cara yang santun dan elegan.

Putra Kurniadi (2013) menulis naskah publikasinya yang berjudul “Perilaku Politik Elit Politik Lokal Pada Pemilukada Kota Tanjungpinang 2012 (Studi Kasus di Kelurahan Sei- Jang Kecamatan Bukit Bestari)”. Hasil penelitian yang didapat pada perilaku politik elit politik lokal kota Tanjungpinang yang dalam penelitian ini adalah Walikota Tanjungpinang yang masih aktif ikut serta dalam mendukung salah satu pasangan calon Walikota Tanjungpinang yang ikut bertarung dalam Pemilukada tahun

2012 merupakan fenomena perilaku politik yang terjadi di daerah dalam hal ini Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis deskripsikan, yakni mengenai perilaku politik elit politik lokal pada Pemilukada Kota Tanjungpinang yang pada bab penulis menyimpulkan bahwa perilaku politik Suryatati. A. Manan selama Pemilukada Kota Tanjungpinang terindikasi banyak mencampuri dan tidak berikap netral dikarenakan pengaruh dan wibawa beliau serta gaya kepemimpinan yang dia miliki cukup besar harusnya beliau bersikap netral mengingat juga beliau merupakan Walikota aktif pada saat itu.

Sedangkan Hendro Fadli Sari dalam jurnalnya yang berjudul “(Perilaku Politik Elit & Hubungan Kyai - Santri) Dukungan Politik Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang Terhadap Pilgub Jatim 2013”. Penelitian yang dilakukannya dengan tujuan untuk mengetahui seberapa efektif peran Kyai terhadap perolehan suara di sekitar Pondok Pesantren Mambaul Maarif. *Pola Traditional Authority Relationship* yang ada

disekitar lingkungan pesantren seringkali dimanfaatkan oleh kandidat untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Ikatan kekerabatan yang masih sangat kental merupakan faktor pertama, walaupun bukan faktor utama yang menjadi sebab kedekatan antara pihak Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar dengan Gus Ipul. Kuatnya praktik politik kekerabatan yang mengatasnamakan ikatan darah dalam proses pencalonan Pilgub menandakan bahwa elite-elite politik terlihat ingin memelihara geneologi politik di kalangan anggota keluarganya sendiri. Gus Ipul merupakan keponakan dari Gus Dur dan Ketua Yayasan Ponpes Mambaul Maarif Denanyar yang juga sebagai istri dari orang yang paling disepuhkan dan disungkani dikalangan Pesantren maupun masyarakat setempat.

Hubungan antara Kyai dengan santri masih cenderung bersifat *Traditional Authority Relationship*. Dimana dalam fenomena yang terjadi di pesantren ini santri sangat tunduk kepada Kyai sebagai pihak yang dijadikan sebagai panutan hidup bermasyarakat. Bahkan ketika Pilgub Jatim kemarin, tanpa ada

mandat atau perintah dari sang Kyai, santri-santri tanpa berfikir lagi ikut memberikan dukungan terhadap orang yang didukung oleh pihak Kyai, yaitu pasangan Sukarwo-Gus Saefullah Yusuf (pasangan KarSa).

Diantara usaha-usaha elit (Kyai) dalam mempertahankan dan melebarkan kekuasaannya adalah dengan cara melibatkan system kekerabatan dan mengembangkan sistem perkawinan *endogamous* sesama keluarga Kyai. Tentu saja dengan hubungan yang tidak seimbang tersebut melahirkan apa yang disebut menguasai (Kyai) dan dikuasai (Santri) secara sadar maupun tidak sadar. Efektivitas *mobilizer* Kyai Imam Kharomain terbukti dengan dimenangkannya perolehan suara di kawasan Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang.

Sementara Darwis (2011) dalam Jurnal dengan judul “Elite Politik Lokal Ibukota Di Kabupaten Morowali”, penelitiannya menemukan permasalahan tentang konflik penempatan Ibukota di Morowali sudah berlangsung kurang lebih lima tahun sejak berdiri sebagai daerah otonomi daerah baru di Indonesia berdasarkan undangundang No. 51/1999. Regulasi ini mengatur

bahwa wilayah Bungku Tengah merupakan ibukota definitif Kabupaten Morowali. Wilayah Kolonodale yang ditetapkan sebagai ibukota sementara Selama kurang lebih lima tahun berfungsinya ibukota sementara di Kolonodale, pembangunan lebih terpacu di wilayah tersebut, se-mentara itu Bungku Tengah tidak mengalami percepatan pembangunan, hal ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik.

Perpecahan pada level elit politik lokal baik pada lembaga pemerintahan daerah maupun di DPRD Kabupaten Morowali berimplikasi terjadinya pembelahan masyarakat dalam dua kelompok komunitas etnis yang berbeda agama, yaitu etnis Bungku mayoritas bera-gama Islam dan etnis Mori pada umumnya bergama Kristen. Konflik ibukota kemudian bergulir masuk ke ranah pertarungan eksistensi kedua komunitas etnis tersebut yang mengakibatkan terjadinya mobilisasi massa yang bersifat anarkis. Konflik dimasyarakat dengan wacana pemindahan ibukota menjadi penting bagi elit politik lokal memanfaatkan momentum tersebut melakukan lokalisasi massa

menghadapi Pemilu 2004 dan Pemilihan Bupati Morowali (Pilkada) 2007.

Tabel 2.1
Tinjauan Pustaka

Nama Penulis	Judul	Temuan
<p>Iqbal Aidar Idrus (2016), Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</p>	<p>Tesis dengan Judul “Peran Elite Lokal Dalam Kemenangan Partai Gerindra Pada Pemilahan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Luwu Utara”</p>	<p>Partai Gerindra berhasil memperoleh suara terbanyak ke dua setelah Partai Golongan Karya dan mendapatkan jatah enam kursi menjadi anggota dewan. Keberhasilan ini didukung oleh tokoh masyarakat di Kabupaten Luwu Utara yang berasal dari golongan elit, seperti elit birokrat, elit ekonomi (pengusaha), dan elit politik mempunyai andil yang besar dalam menarik simpatisan masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Gerindra. Pada penelitian ini terlihat masyarakat memilih calon bukan karena Partai, melainkan karena calon anggota dewan yang diusung Partai Gerindra mempunyai ketokohan di daerah pemilihanya masing-</p>

		<p>masing, apa lagi dengan kekuasaan dan kekayaan yang di miliknya, di tambah dengan kehadiran tiga tokoh elit lokal yang menduduki posisi penting di partai, yaitu Indah Putri Indriani, Arsyad Kasmar dan Tahar Rum yang merupakan calon bupati pada saat Pilkada, yang mempunyai basis suara yang besar dan pendukung panatik di empat dapil Luwu utara.</p>
<p>Rasyid Pora, Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014)</p>	<p>Tesis berjudul “Konflik elit dalam kontestasi kekuasaan internal partai politik (studi kasus pada DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara</p>	<p>Tarikan kepentingan yang bervariasi (pemilukada, pileg, dan pilpres) jelang pergantian ketua DPW PAN Maluku Utara adalah titik awal lahirnya embrio konflik ditubuh partai secara internal. Kedua, Penyebab terjadinya konflik adalah akibat dari</p>

	Tahun 2013)”	<p>menguatnya sikap pragmatisme elit partai, seperti terjadinya perebutan kursi pimpinan partai, memanfaatkan posisi carateker, ketidakpatuhan terhadap norma partai serta intervensi DPP PAN terhadap proses Muswilub. Ketiga, konsekuensi logis atas konflik yang terbuka di internal partai adalah eksodusnya beribu-ribu kader partai (termasuk kader potensial) ke partai lain. DPW PAN Maluku Utara pun gagal kembali pada pemilihan Gubernur Maluku Utara Periode 2013-2018 yang mengusung pasangan calon Muhajir-Sahrin. lemahnya politik akomodasi bagi Ketua Umum terpilih terhadap pihak yang kalah, sehingga eksistensi partai menjadi tergerus oleh menguatnya sikap antipati dari berbagai kalangan, termasuk pemilih atau masyarakat. Dalam konteks itulah, upaya penyelesaian konflik di DPW PAN Maluku Utara haruslah dilakukan dengan cara-cara yang</p>
--	--------------	--

		santun dan elegan.
Darwis (2011), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Palu.	Jurnal berjudul “Elite Politik Lokal Ibukota Di Kabupaten Morowali Konflik penempatan ibukota di Kabupaten Morowali”	Wilayah Kolonodale yang ditetapkan sebagai ibukota sementara Morowali selama kurang lebih lima tahun. Dengan berfungsi sebagai ibukota, maka pembangunan lebih terpacu di wilayah tersebut. Sementara itu Bungku Tengah tidak mengalami percepatan pembangunan, hal ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik. Perpecahan pada level elit politik lokal baik pada lembaga pemerintahan daerah maupun di DPRD Kabupaten Morowali berimplikasi terjadinya pembelahan masyarakat dalam dua kelompok komunitas etnis yang berbeda agama, yaitu etnis Bungku mayoritas beragama Islam dan etnis Mori pada umumnya bergama Kristen. Konflik dimasyarakat dengan wacana pemindahan ibukota menjadi penting bagi elit politik lokal memanfaatkan momentum tersebut melakukan lokalisasi

		<p>massa menghadapi Pemilu 2004 dan Pemilihan Bupati Morowali (Pilkada) 2007.</p>
<p>Putra Kurniadi (2013), Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.</p>	<p>Naskah publikasi yang berjudul : “Perilaku Politik Elit Politik Lokal Pada Pemilukada Kota Tanjungpinang 2012 (studi kasus di kelurahan Sei- Jang kecamatan Bukit Bestari)”.</p>	<p>Walikota Tanjungpinang yang masih aktif ikut serta dalam mendukung salah satu pasangan calon Walikota Tanjungpinang yang ikut bertarung dalam Pemilukada tahun 2012 merupakan fenomena perilaku politik yang terjadi di daerah Kota Tanjungpinang. perilaku politik Suryatati. A. Manan selama Pemilukada Kota Tanjungpinang terindikasi banyak mencampuri dan tidak berikap netral dikarenakan pengaruh dan wibawa beliau serta gaya kepemimpinan yang dia miliki cukup besar harusnya beliau bersikap netral mengingat juga beliau merupakan Walikota aktif pada saat itu.</p>

<p>Hendro Fadli Sari, Universitas Airlangga Surabaya.</p>	<p>Jurnal yang berjudul “(Perilaku Politik Elit & Hubungan Kyai - Santri) Dukungan Politik Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang Terhadap Pilgub Jatim 2013”.</p>	<p>Kuatnya praktik politik kekerabatan yang mengatasnamakan ikatan darah dalam proses pencalonan Pilgub menandakan bahwa elite-elite politik terlihat ingin memelihara geneologi politik di kalangan anggota keluarganya sendiri. Hubungan antara Kyai dengan santri masih cenderung bersifat <i>Traditional Authority Relationship</i>. Dimana dalam fenomena yang terjadi di pesantren ini santri sangat tunduk kepada Kyai sebagai pihak yang dijadikan sebagai panutan hidup bermasyarakat. Diantara usaha-usaha elit (Kyai) dalam mempertahankan dan melebarkan kekuasaannya adalah dengan cara melibatkan system kekerabatan dan mengembangkan sistem perkawinan <i>endogamous</i> sesama keluarga Kyai.</p>
---	---	--

Dari lima penelitian terdahulu yang diuraikan di atas diyakini benar bahwa tidak ada kesamaan dalam pembahasannya dengan penelitian tesis ini. Perilaku elit politik Partai Persatuan Pembangunan Bantul di Pemilukada Bantul 2015 belum ada yang meneliti.

Dari kelima penelitian terdahulu ada perbedaan di rumusan masalah dan definisi operasionalnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari misalnya penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Aidar Idrus yang pembahasannya bahwa keberhasilan Partai Gerindra meraih suara terbanyak di Kabupaten Luwu Utara lebih dikarenakan faktor masyarakat memilih calon bukan karena Partai, melainkan karena calon anggota dewan yang diusung Partai Gerindra mempunyai ketokohan di daerah pemilihannya masing-masing, apa lagi dengan kekuasaan dan kekayaan yang di milikinya, di tambah dengan kehadiran tiga tokoh elit lokal yang menduduki posisi penting di partai.

Sedangkan Rasyid Pora dalam penelitiannya bahwa adanya tarikan kepentingan yang bervariasi, menguatnya sikap pragmatisme elit partai, seperti terjadinya perebutan kursi

pimpinan partai, memanfaatkan posisi carateker, ketidakpatuhan terhadap norma partai serta intervensi DPP PAN serta eksodus kader ke partai lain adalah penyebab konflik internal di DPW PAN Maluku Utara. Begitu juga Darwis dalam pembahasannya lebih ditekankan pada konflik dimasyarakat dengan wacana pemindahan ibukota menjadi penting bagi elit politik lokal memanfaatkan momentum tersebut melakukan lokalisasi massa menghadapi Pemilu 2004 dan Pemilihan Bupati Morowali.

Sedangkan Putra Kurnidi menemukan ketidak netralan Walikota aktif Tanjung pinang yang turut serta mendukung salah satu pasangan calon yang mengikuti tahapan Pemilukada Tanjungpinang tahun 20102. Hendro Fadli Sari dalam penelitiannya praktik politik kekerabatan yang mengatasnamakan ikatan darah dalam proses pencalonan Pilgub menandakan bahwa elite-elite politik terlihat ingin memelihara geneologi politik di kalangan anggota keluarganya sendiri. Diantara usaha-usaha elit (Kyai) dalam mempertahankan dan melebarkan kekuasaannya adalah dengan cara melibatkan system kekerabatan dan

mengembangkan sistem perkawinan *endogamous* sesama keluarga Kyai.

Maka dari lima hasil penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitiannya sangat jauh berbeda dan tidak memiliki kesamaan judul, walaupun ada teori yang mungkin hampir sama maksud dan arti dari teori tersebut, namun penelitian ini lebih difokuskan pada perilaku elit politik Partai Persatuan Pembangunan Bantul pada Pemilu pada Bantul 2015.

II. 2. KERANGKA TEORI

II. 2. 1. PERILAKU ELIT POLITIK

Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti (2010:167) dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.

Pendekatan behaviorisme akan menjawab bahwa individu adalah yang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu yang berpola tertentu (Eulau, 1986, dalam Surbakti, 2010:168). Namun demikian yang selalu melakukan kegiatan politik adalah Pemerintah (lembaga-lembaga dan perannya) dan partai-partai politik karena fungsi mereka dalam bidang politik. Oleh karena itu, perilaku politik itu dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok, yaitu :

1. Perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah.
2. Perilaku politik warga negara biasa (baik sebagai individu maupun kelompok).

Dari yang pertama disebutkan diatas yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik. Sedangkan yang kedua, karena tidak memiliki kewenangan seperti pihak pertama, maka yang kedua berhak untuk mempengaruhi pihak yang pertama dalam melaksanakan fungsinya. Karena apa yang dilakukan oleh pihak yang pertama,

menyangkut kehidupan politik pihak yang kedua. Kegiatan politik pihak kedua itu disebut sebagai partisipasi politik (Sitepu, 2012:87).

Menurut Sitepu (2012:89) untuk melakukan kajian terhadap perilaku elit politik dapat dipilih tiga unit analisa, yaitu :

1. Individu sebagai aktor politik, meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa.
2. Agregasi politik meliputi individu aktor politik secara kolektif, seperti misalnya kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan dan bangsa.
3. Tipologi kepribadian politik yaitu tipe-tipe kepribadian pemimpin yang otoriter, machiavelis dan demokrat.

Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti (2010:169) dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

1. Lingkungan sosial politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.
2. Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Lingkungan langsung ini dipengaruhi oleh lingkungan tidak langsung.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.

Terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan. Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian diri. Basis yang ketiga merupakan sikap yang menjadi eksternalisasi diri dan pertahanan diri.

4. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor

secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

Elit politik menurut Haryanto (2005:72) adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keunggulan dan yang bersangkutan mampu memainkan peran menonjol dan mempunyai peran besar di bidang politik. Elit politik menurut Mashad, et.al (2005:12) dalam konteks lokal dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu elit politik lokal dan elit *non* politik lokal. Elit politik lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD dan pemimpin-pemimpin partai politik.

Sedangkan elit *non* politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik lokal ini seperti elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya (Mashad at al, 2005:13).

Elit politik (dalam Surbakti, 2010:96) jika ditelaah dari segi sifat dan karakternya dapat digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu

1. Elit konservatif

Yaitu elit politik yang dalam segala tindakannya berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan. Tipe ini cenderung bersifat tertutup, dalam arti menolak golongan yang bukan elit memasuki lingkungan elit. Sikap dan perilakunya cenderung memelihara dan mempertahankan struktur masyarakat yang secara jelas menguntungkannya.

2. Elit liberal

Sikap dan perilakunya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga masyarakat untuk

meningkatkan status sosial. Elit ini cenderung bersifat terbuka terhadap golongan masyarakat yang bukan elit untuk menjadi bagian dari lingkungan elit dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang elit.

3. Perlawanan elit

Kelompok elit yang terdiri dari para pemimpin yang berorientasi pada khalayak, baik dengan cara menentang segala bentuk kemapanan (established order) maupun dengan cara menentang segala bentuk perubahan. Kelompok perlawanan elit ini terdiri dari dua sayap, yaitu sayap kanan yang menentang berbagai perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang kedua sayap kiri, menuntut perubahan secara radikal dan revolusioner.

Menurut Mosca dalam Verma (2001:203) yang membedakan elit politik adalah “kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik”, sekali kelas yang memerintah tersebut kehilangan kecakapannya dan orang-orang di luar kelas tersebut menunjukkan kecakapannya yang lebih baik, maka terdapat

segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru.

Perilaku elit politik mengalami bermacam-macam kecenderungan yang senantiasa terdapat pilihan-pilihan, kebutuhan-kebutuhan, hasrat-hasrat dan motif-motif. Hukum-hukum penawaran dan permintaan bagaikan dinamika aktifitas pasar yang selalu muncul sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Mukhlis, 2015).

Perilaku politik terdiri dari beberapa aspek, yaitu pragmatis, akomodatif, kritis dan rasional.

1. Pragmatis

Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani "*pragma*" yang berarti perbuatan atau tindakan. "*Isme*" di sini sama artinya dengan *isme-isme* yang lainnya yaitu berarti aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pola pikir pragmatis bisa terjadi dilandasi beberapa kemungkinan, seperti untuk mendapatkan posisi atau jabatan strategis di partai, materi

(uang) baik untuk kepentingan pribadi maupun partai yang mungkin akan didapatkan jika bersedia mendukung salah satu pasangan calon Bupati-Wakil Bupati. Pola pikir pragmatis yang berikutnya yaitu demi menjaga diri dari kemungkinan di pindah posisi baik dalam kapasitasnya sebagai pengurus partai ataupun agar tidak terkena pergantian antar waktu (PAW) dalam kapasitasnya sebagai anggota legislatif dari partai yang bersangkutan.

2. Akomodatif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) akomodatif adalah bersifat menyesuaikan diri. Menurut Soerjono Soekanto (2006:68) istilah akomodasi digunakan dalam dua arti, yaitu sebagai suatu keadaan dan proses. Sebagai suatu keadaan, akomodasi diartikan sebagai kenyataan adanya suatu keseimbangan hubungan antar individu atau kelompok dalam berinteraksi. Sebagai suatu proses, akomodasi dimaksudkan sebagai usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka

mencapai kestabilan. Perilaku politik yang akomodatif seperti misalnya berkenan untuk menegosiasikan segala kepentingan yang ada dalam sebuah proses politik di Pemilukada. Perilaku politik mengakomodasi kerjasama dengan partai lain sebagai mitra koalisi. Karena dalam koalisi partai akan sangat banyak kepentingan maupun keinginan yang harus diamodasi agar segala prosesnya berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan.

3. Kritis

Menurut Cece Wijaya (2010) dalam Nurhayati (2014:15) juga mengungkapkan gagasannya mengenai kemampuan berpikir kritis, yaitu kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Sebagai modal untuk mempertahankan eksistensinya baik di dalam partai maupun di luar partai, maka berpikir kritis atas setiap kebijakan serta kepentingan politik yang

ada merupakan upaya menganalisis suatu permasalahan hingga pada tahap pencarian solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan memahami permasalahan dan mempunyai solusi atas setiap persoalan politik yang dihadapinya akan membawa para elit politik pada kondisi aman dari kemungkinan buruk terhadap karir maupun urusan politiknya.

4. Rasional

Sebagai elit politik semestinya harus mampu berpikir rasional atas setiap kebijakan yang dibuatnya. Setiap kebijakan yang dilakukan tanpa berpikir rasional kemungkinan akan mendapatkan hasil dan respon negatif, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partainya. Elit politik harus mampu berpikir dan bertindak berdasarkan efeknya bagi masa kini dan masa yang akan datang.

5. Oligarki Elit Partai

Winters (2002:1) dalam Choiriyati (2013:689) melacak oligarki sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan

politik berada di tangan minoritas kecil. Sementara itu dasar kekuasaan dari minoritas oligarkis bersumber pada segala bentuk pengaruh minoritas yang didasarkan kepada konsentrasi kekuasaan. Oligarki sebagai satu ragam “kekuasaan sekelompok kecil”, lalu oligark (*oligarch*) dimaknai sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi secara besar-besaran sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya.

Perilaku elit politik ditegaskan Carles W. Mills (1956) dalam Mukhlis (2005), bahwa para elit dapat mempengaruhi publik atas aktivitas yang dilakukan dengan posisi yang dimiliki yang sangat strategis dari struktur organisasi. Pettigrew (1973) dalam Bodroastuti (2010) mendeskripsikannya sebagai penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Beberapa definisi menghubungkan hal ini dengan karakteristik disfungsi pada organisasi.

Laswell dalam Varma (2001:266) member penekanan dari insting subjektif yang mendasari perilaku manusia pada nilai-nilai yang akan mengarahkan perilaku tersebut. Nilai-nilai yang senantiasa dicari manusia adalah kehormatan, pendapatan, keamanan. Dengan menambahkan nilai martabat atau kehormatan (yang selanjutnya dimisalkan sebagai status, kemuliaan, pengakuan, dan prestis). Dalam klasifikasi martabat dan kehormatan ini dia juga memasukkan “kejujuran”, yang secara superfisial dapat berarti kebajikan moral, kebaikan ataupun kebenaran. Pada pemahaman yang lebih mendalam, seseorang akan merasa bahwa kejujuran tidak lagi merupakan kepalsuan dari manusia politik dalam rangka menyembunyikan agresifitasnya dengan memnunjukkan kemauan bermusyawarah pada apa yang mungkin dipandang sebagai norma-norma sosial.

Perilaku elit politik merupakan perilaku yang secara organisasional tidak ada sanksinya, yang mungkin dapat merugikan bagi tujuan organisasi atau bagi kepentingan orang lain dalam organisasi, Randall (1999) dalam Bodroastuti (2010). Mintzberg (1985) dalam Bodroastuti (2010) melihatnya sebagai

tindakan yang melampaui parameter yang dapat diterima sebagai perilaku organisasi.

Namun pada hakekatnya, berbagai definisi itu berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau pada perilaku anggota yang mendahulukan kepentingan pribadinya dan tidak mau melayani kebutuhan organisasi. Dalam kasus ini, perilaku elit politik didefinisikan sebagai aktifitas yang tidak dianggap sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi mempengaruhi, atau berusaha mempengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi, Robbins (2007) dalam Bodroastuti (2010).

II. 2. 2. TEORI ELIT PARTAI

Gaetano Mosca dalam Surbakti (2010:94) menjelaskan distribusi kekuasaan dalam masyarakat menjadi dua kelas, yaitu :

1. Kelas yang memerintah, yang terdiri dari sedikit orang, melaksanakan fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan

menikmati keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan dengan kekuasaan.

2. Kelas yang diperintah, yang berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semesta dan paksaan.

Jumlah orang yang berkuasa atau memerintah dalam suatu masyarakat selalu lebih sedikit daripada yang diperintah. Itu sebabnya mengapa elit politik dirumuskan sebagai sekelompok kecil orang yang mempunyai pengaruh besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Diantara elit politik terdapat kesamaan nilai dan berusaha mempertahankan nilai-nilai, yang berarti mempertahankan status sebagai elit politik.

Non elit yang telah menerima konsensus dasar elit saja yang dapat diterima dalam lingkungan elit. Golongan elit memiliki konsensus mengenai nilai-nilai dasar suatu sistem dan berusaha memelihara serta mempertahankan sistem itu. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh elit politik bukanlah cerminan aspirasi khalayak, juga bukan hasil tuntutan yang diajukan

khlayak, melainkan lebih merupakan cerminan nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok elit (Surbakti, 2010:95).

Mosca menjelaskan hubungan dinamis antara elit dan massa. Dalam pandangannya, para elit berusaha bukan hanya mengangkat dirinya di atas anggota masyarakat lain, tetapi juga mempertahankan statusnya terhadap massa di bawahnya, melalui para “sub-elit” yang terdiri dari kelompok besar dari “seluruh kelompok menengah yang baru, aparatur pemerintahan, manager, administrator, ilmuwan lainnya (Widjaya, 1988).

Setiap masyarakat di manapun berada akan selalu dipimpin oleh sekelompok kecil individu yang berkuasa atas sejumlah besar anggota masyarakat lainnya, yang disebut massa, untuk tunduk dan mematuhi perintah-perintahnya. Massa bersedia untuk tunduk dan mentaati perintah-perintah tersebut karena pada diri elit terlekat kekuasaan yang jumlahnya lebih besar ketimbang yang dimilikinya (Darwis, 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan yang ada dalam masyarakat tidak terdistribusikan secara merata. Terdapat sekelompok kecil individu dengan jumlah kekuasaan yang lebih besar dibandingkan

sejumlah besar individu dengan kekuasaan yang sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali (Haryanto, 2005).

Putnam dalam Mas'ood (2001) menyampaikan bahwa elit merupakan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Fokus kajiannya adalah kekuasaan, yang terbagi ke dalam dua konsepsi. Pertama, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain. Kedua, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif, seperti undang-undang. Karena itu, Putnam membagi elit ke dalam dua kelompok, yakni mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting”, dan mereka yang tidak memilikinya.

Menurut Keller, sebagaimana dikutip oleh Duverger (2006), bahwa studi tentang elit memusatkan perhatian pada empat hal. Pertama, anatomi elit berkenaan dengan siapa, berapa banyak dan bagaimana para elit itu muncul. Kedua, fungsi elit berkenaan dengan apa tanggungjawab sosial elit. Ketiga, pembinaan elit menyangkut tentang siapa yang mendapatkan kesempatan menjadi elit, imbalan apa yang mereka terima, dan kewajiban-

kewajiban apa yang menunggu mereka. Keempat, keberlangsungan (bertahannya) elit berkenaan dengan bagaimana dan kenapa para elit itu dapat bertahan, serta bagaimana dan kenapa diantara mereka hancur atau tidak dapat bertahan.

Secara konfiguratif, menurut Dogan dalam Darwis (2011), bahwa kategorisasi elit beragam tergantung pada posisi jabatan dan ruang lingkup batas otoritas kekuasaan yang dipegangnya. Menurutnya elit yang monohirarki (*mono-hierarchical*) dapat dikatakan elitis yang sangat fokus pada puncak kekuasaan. Sedangkan, poliarki (*polyarchical*) kekuasaan menyebar di berbagai institusi dengan beragam perbedaan kewenangan. Perbedaan sesungguhnya, menurut Dogan dalam Darwis (2011), tergantung sistem politik yang dianut oleh negara itu sendiri. Namun Dogan menegaskan bahwa pada prinsipnya, elit merupakan populasi yang kecil dan pemegang kekuasaan untuk membedakan dengan populasi yang tidak memiliki kekuasaan relatif jumlah besar.

Partai menurut Heywood (2014:392) adalah sebuah kelompok masyarakat yang diorganisasikan untuk tujuan memenangkan

kekuasaan pemerintahan, melalui sarana pemilihan atau yang lain. Partai-partai dapat bersifat otoriter atau demokratis, mereka mungkin meraih kekuasaan melalui pemilihan atau melalui revolusi dan mereka mungkin mengusung ideologi-ideologi aliran kiri, kanan atau tengah, bahkan mengingkari ide-ide politik sama sekali. Perkembangan partai-partai politik dan pembentukan sebuah sistem partai telah diakui sebagai salah satu tanda modernisasi politik.

Dalam dinamika partai politik di aras lokal, kita temukan “orang kuat partai” yang secara individu memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan kebijakan partai. Orang inilah yang disebut Keller (1995) sebagai elite penentu. Orang kuat partai ini secara individual mampu mengekspresikan pengaruh dan memastikan distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan bukan karena yang bersangkutan menduduki jabatan tertinggi di puncak piramida elit partai (ketua umum), tetapi meski hanya sebagai pengurus harian partai karena yang bersangkutan memiliki kapasitas pribadi yang mumpuni dibanding orang lain maka orang ini bisa menjadi orang penting di partai. Orang kuat

partai ini bahkan bisa menerobos ketentuan partai dan menentukan *policy* partai karena memiliki kelebihan-kebihan diatas rata-rata pengurus partai lainnya. Meminjam istilah Putnam dalam analisa elit individu seperti ini disebut “orang kuat partai” karena memiliki reputasi dan kontribusi pengambilan keputusan yang lebih besar dibanding posisinya di partai.

II. 2. 3. TEORI PILIHAN RASIONAL

Di antara pendekatan-pendekatan teoritis mutakhir dalam ilmu politik adalah apa yang disebut sebagai teori pilihan rasional. Pendekatan ini mengambil banyak pada contoh dari teori ekonomi dalam membangun model-model yang berdasarkan pada aturan prosedural, biasanya tentang perilaku rasional dari individu-individu yang terlibat (Heywood, 2014:23). Selain itu pendekatan ini menyediakan paling tidak sebuah alat analitis yang berguna, yang dapat menyediakan wawasan tentang aksi-aksi dari para pemilih, pelobi, birokrat dan politisi, juga tentang perilaku dari negara-negara di dalam sistem internasional.

Pendekatan pilihan rasional menurut Sitepu (2012:91) lebih menitik beratkan pada perhitungan untung rugi. Pendekatan ini melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah tidak hanya “ongkos” memilih akan tetapi kemungkinan suaranya itu dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan juga sebagai alternatif berupa pilihan yang ada. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi dipergunakan untuk membangun sebuah keputusan tentang partai politik atau seorang kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Pendekatan model pilihan rational menurut Surbakti (2010:186) terdapat lima faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Struktural

Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai.

2. Sosiologis

Menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.

3. Ekologis

Digunakan dalam suatu daerah pemilihan yang terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Kelompok masyarakat, seperti penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu, dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum. Pendekatan ekologis ini sangat diperlukan karena karakteristik

data hasil pemilihan umum untuk tingkat provinsi berbeda dengan karakteristik kabupaten, atau data karakteristik kabupaten berbeda dengan karakteristik data tingkat kecamatan.

4. Psikologis sosial

Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih terhadap partai tertentu. Kongkretnya partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

5. Pilihan rasional

Kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih untuk dan kandidat yang hendak

mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik. Dalam sosiologi dipopulerkan oleh James S. Coleman pada jurnal *rationality and society* (1989) dalam Ritzer (2004), yang dimaksudkan untuk menyebarkan pemikiran yang bersasal dari perspektif pilihan rasional. Teori pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau pilihan (prefensi).

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor juga dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan,

yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya.

Teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro, untuk menjelaskan fenomena tingkat makro. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor, dimana aktor dipandang sebagai mempunyai tujuan dan mempunyai maksud.

Ada dua unsur utama teori Coleman dalam Ritzer (2004), yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan bahwa dalam suatu sistem sosial minimal terdapat dua orang aktor yang mengendalikan sumber daya tersebut. Keberadaan sumber daya tersebut menjadi pengikat yang mengakibatkan sifat saling membutuhkan diantara keduanya. Sehingga secara tidak langsung tindakan yang melibatkan kedua aktor tersebut menuju pada tingkatan sistem sosial.

Analisis Fenomena Makro menggunakan teori pilihan rasional
:

1. Perilaku Kolektif

Teori pilihan rasional dapat menganalisis perilaku kolektif, meskipun sifat perilaku kolektif tidak stabil dan kacau. Teori pilihan rasional dapat menjelaskan penyebab adanya perilaku kolektif yang liar dari seorang atau beberapa aktor terhadap aktor lain. Menurut teori pilihan rasional, adanya perilaku yang demikian dikarenakan mereka berupaya memaksimalkan kepentingan mereka. Adanya upaya memaksimalkan kepentingan individual tersebut menyebabkan keseimbangan kontrol antara beberapa aktor dan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, dalam perilaku kolektif, adanya upaya memaksimalkan kepentingan individu tak selalu menyebabkan keseimbangan sistem.

2. Norma

Menurut Coleman, norma diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang. Mereka memahami keuntungan dibentuknya norma tersebut, dan kerugian apabila terjadi pelanggaran terhadap norma. Aktor berusaha

memaksimalkan *utilitas* mereka, sebagian dengan menggerakkan hak untuk mengendalikan diri mereka sendiri dan memperoleh sebagian hak untuk mengendalikan aktor lain. Tetapi ada pula keadaan di mana norma berperan menguntungkan orang tertentu dan merugikan orang lain. Dalam kasus tertentu, aktor menyerahkan hak (melalui norma) untuk mengendalikan tindakan orang lain. Selanjutnya keefektifan norma tergantung pada kemampuan melaksanakan consensus tersebut. Konsensus dan pelaksanaannya adalah yang mencegah tanda-tanda ketidakseimbangan perilaku kolektif.

Coleman melihat norma dari tiga sudut unsur utama teorinya dari mikro ke makro, tindakan bertujuan di tingkat mikro dan dari makro ke mikro. Norma adalah fenomena makro yang ada berdasarkan tindakan bertujuan di tingkat mikro.

3. Aktor Korporat

Dengan kasus norma, Coleman bergerak ke level makro dan melanjutkan analisisnya pada level ini ketika

membahas aktor korporat. Dalam suatu kelompok kolektif, aktor tidak dapat bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Ada berbagai aturan dan mekanisme agar dapat berpindah dari pilihan individu menuju pilihan kolektif. Coleman beragumen bahwa aktor korporat dan aktor manusia memiliki tujuan. Terlebih lagi dalam struktur korporat seperti organisasi, aktor manusia bisa mengejar tujuan mereka yang berbeda dengan tujuan korporat.

Coleman mulai dari individu dan dari gagasan bahwa semua hak dan sumber daya tersedia pada level ini. kepentingan individu menentukan seluruh peristiwa. Didunia modern aktor korporat semakin penting.

II. 2. 4. TEORI PILIHAN POLITIK

Setiap masyarakat dan setiap saat tertentu, tingkat-tingkat, landasan-landasan, dan bentuk-bentuk partisipasi politik jauh lebih banyak dibentuk oleh faktor-faktor politik daripada oleh faktor-faktor lainnya (Huntington,1994:38). Didalam setiap

masyarakat, sikap elit politik terhadap partisipasi politik mungkin merupakan faktor tunggal yang paling efektif dalam mempengaruhi sifat partisipasi politik dimasyarakat itu. Partisipasi yang dimobilisasi hanya terjadi apabila kaum elit politik berupaya melibatkan massa rakyat dalam kegiatan politiknya (Huntington,1994:89).

Partisipasi politik yang dimobilisasi pada akhirnya akan menuju kepada sebuah pilihan politik tertentu. Pilihan politik terbentuk karena elit politik yang menginginkan manfaat partisipasi yang luas, berupa dukungan bagi mereka sendiri dan bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Bagi banyak elit politik, partisipasi itu paling banter merupakan satu alat dan bukan suatu nilai utama (Huntington,1994:40).

Pilihan politik sebagai wujud partisipasi yang biasanya ditentukan oleh efek-efek terhadap kemampuan para elit politik :

- a. Meraih kekuatan dan tetap berkuasa
- b. Untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan politik lainnya, seperti kemerdekaan nasional, perubahan

revolusioner, pembangunan ekonomi, dan pemerataan sosio-ekonomi (Huntington,1994:41).

Pilihan politik terbentuk karena beberapa aspek yang mempengaruhinya.

Aspek-aspek tersebut adalah :

1. Patron Klien

Istilah “*patron*” berasal dari bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh, sedangkan klien berarti bawahan atau orang yang diperintah dan yang disuruh (Usman, 2004:132). Menurut Scott (1972) dalam Suprihatin (2002) mengemukakan hubungan patron klien sebagai suatu keadaan khusus dari persekutuan *dyadic* (dua orang) yang melibatkan sebagian besar persahabatan, sementara seorang atau kelompok yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi berperan sebagai patron, menggunakan pengaruh, dan penghasilannya untuk memberikan perlindungan dan kebaikan kepada seseorang atau kelompok yang memiliki status sosial ekonomi lebih rendah. Kelompok ini

berperan sebagai klien, bersedia membalas budi berupa dukungan menyeluruh yang meliputi pelayanan pribadi kepada patron.

Menurut Scott (1972) dalam (Rustinsyah, 2011) hubungan patron klien adalah *a special case of dyadic (two person) ties involving a largely instrumental friendship in which an individual of higher socio economic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection as benefits for both, for a person of a lower status (client) who for his part reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to their patron.*

Hubungan patron klien bersifat tatap muka, artinya bahwa patron mengenal secara pribadi klien karena mereka bertemu tatap muka, saling mengenal pribadinya, dan saling mempercayai. Lande (1964) dalam (Rustinsyah, 2011) menyebut model patron klien sebagai solidaritas vertikal.

Ciri-ciri hubungan patron klien menurut Scott (1972) adalah (1) terdapat suatu ketimpangan (*inequality*) dalam pertukaran. Ketidak seimbangan terjadi karena patron berada dalam posisi pemberi barang atau jasa yang sangat diperlukan bagi klien dan

keluarganya agar mereka dapat tetap hidup. Rasa wajib membalas pada diri klien muncul akibat pemberian tersebut, selama pemberian itu masih mampu memenuhi kebutuhan klien yang paling pokok. Jika klien merasa apa yang dia berikan tidak dibalas sepentasnya oleh patron, dia akan melepaskan diri dari hubungan tersebut tanpa sangsi. (2) bersifat tatap muka, sifat ini memberi makna bahwa hubungan patron klien adalah hubungan pribadi, yaitu hubungan yang didasari rasa saling percaya. Masing-masing pihak mengandalkan penuh pada kepercayaan, karena hubungan ini tidak disertai perjanjian tertulis. Dengan demikian, walaupun hubungan patron klien bersifat instrumental, artinya kedua belah pihak memperhitungkan untung-rugi, namun unsur rasa selalu menyertai. (3) bersifat luwes dan meluas, Dalam relasi Inl bantuan yang diminta patron dapat bermacam-macam, mulai membantu memperbaiki rumah, mengolah tanah, sampai ke kampanye politik. Klien mendapat bantuan tidak hanya pada saat mengalami musibah, tetapi juga bila mengalami kesulitan mengurus sesuatu. Dengan kata lain, hubungan ini dapat

dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan oleh kedua belah pihak, sekaligus sebagai jaminan sosial bagi mereka.

Adanya unsur ketimpangan dalam pertukaran dikatakan Scott (1972) sebagai *disparity in their relative wealth, power and status. A client, in this sense, is someone who has entered an unequal exchange relation in which he is unable to reciprocate fully. A debt of obligation binds him the patron.* Foster (1963) dalam Rustinsyahm (2011) dalam hubungan patron klien atau timbal balik terjadi pada orang yang sama statusnya (*colleague contracts*). Foster menyebut hubungan patron klien sebagai *dyadic contracts*.

2. Komunitas Religius

Kata *community* menurut Syahyuti dalam Sari (2009) berasal dari bahas latin "*cum*" yang mengandung arti kebersamaan dan "*munus*" yang berarti memberi antara satu sama lain. Maka dapat diartikan komunitas sebagai sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung antara satu sama lain.

Iriantara (2004) dalam Sari (2009) mendefinisikan makna komunitas adalah sekumpulan individu yang mendiami lokasi

tertentu dan biasanya terkait dengan kepentingan yang sama. Sedangkan menurut Wanger (2004) dalam Sari (2009) komunitas itu adalah sekumpulan orang yang saling berbagi masalah, perhatian atau kegemaran, terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan cara saling berinteraksi terus menerus. Pengertian komunitas menurut Kertajaya Hermawan (2008) adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values.

Menurut James Martineau dalam Rakhmat (2004) istilah religi berasal dari kata latin *religio*, yang dapat berarti *obligation* atau kewajiban. Dalam *Encyclopedia of Philosophy*, istilah religi ini dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak Ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia.

3. Karisma

Secara etimologi kata karisma berasal dari bahasa Yunani “*Charisma*” yang berarti karunia atau bakat khusus (Hariyono, 2009). Karisma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Selain itu karisma menurut KBBI berarti atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu.

Max Weber dalam Rebiru (1992) mengartikan karisma sebagai gejala sosial yang terdapat pada waktu kebutuhan kuat muncul terhadap legitimasi otoritas. Weber menekankan bahwa yang menentukan kebenaran kharisma adalah pengakuan pengikutnya. Pengakuan atau kepercayaan kepada tuntutan kekuatan gaib merupakan unsur integral dalam gejala karisma. Karisma adalah pengakuan terhadap suatu tuntutan sosial.

Weber dalam Hariyono (2009) mengartikan karisma sebagai sifat yang melekat pada seorang pemimpin dengan mengatakan

pemimpin kharismatik adalah seseorang yang seolah-olah diberi tugas khusus dan karena itu dikaruniai bakat-bakat khusus oleh Tuhan untuk memimpin sekelompok manusia mengarungi tantangan sejarah hidupnya.

4. Rasional

Sulaiman (2011) dalam Wulandari (2014) menyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat berpikir rasional sangat penting agar seseorang mampu bersaing untuk maju. Kemampuan berpikir jernih dan rasional diperlukan pada pekerjaan apapun, ketika mempelajari bidang ilmu apapun, untuk memecahkan masalah apapun, sehingga dengan kata lain berpikir rasional ini merupakan aset berharga bagi karir seorang.

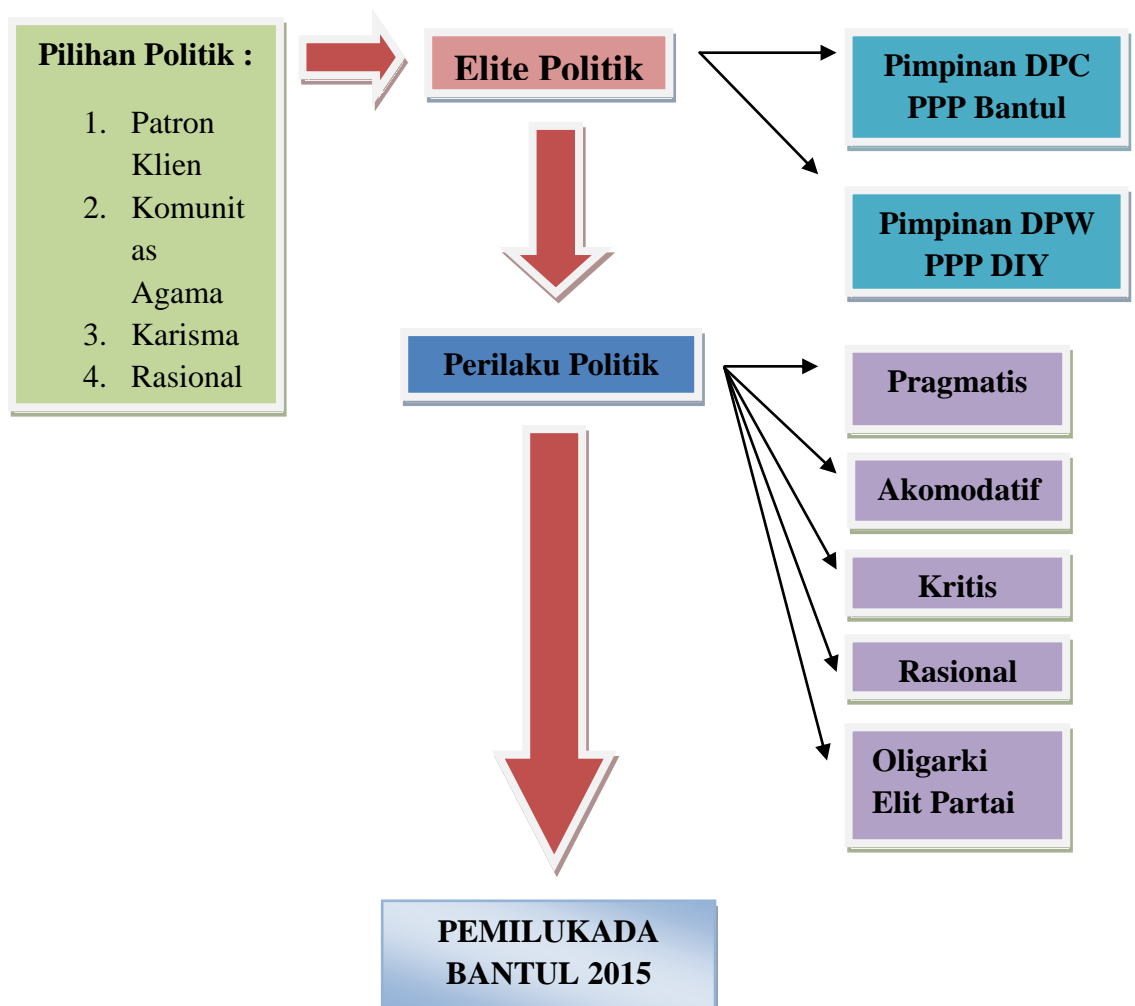
Kemampuan berpikir rasional menurut Dewey dalam Daryanto (2009; Wulandari, 2014) meliputi langkah-langkah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Sedangkan menurut Richetti dan Treogoe dalam Fitriyanti (2009; Wulandari (2014) "*Rational thinking helps us arrive at a conclusion to be able to do something*". Menurut Syah (2008) dalam Wulandari (2014)

menyatakan bahwa berpikir rasional merupakan perwujudan perilaku belajar terutama yang berkaitan dengan pemecahan masalah.

II. 3. KERANGKA PIKIR

Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian



II. 4. Definisi Konsepsional

Definisi konseptual merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konsepsional dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Pengertian konseptual dalam pembahasan ini adalah:

1. Pilihan Rational merupakan kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah tidak hanya “ongkos” memilih akan tetapi kemungkinan suaranya itu dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan juga sebagai alternatif berupa pilihan yang ada, bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi dipergunakan untuk membangun sebuah keputusan tentang partai politik atau seorang kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

2. Elit partai adalah orang kuat yang secara individual mampu mengekspresikan pengaruh dan memastikan distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan bukan karena yang bersangkutan menduduki jabatan tertinggi di puncak piramida elit partai (ketua umum), tetapi meski hanya sebagai pengurus harian partai karena yang bersangkutan memiliki kapasitas pribadi yang mumpuni dibanding orang lain maka orang ini bisa menjadi orang penting di partai. Orang kuat partai ini bahkan bisa menerobos ketentuan partai dan menentukan *policy* partai karena memiliki kelebihan-kebihan diatas rata-rata pengurus partai lainnya.
3. Pilihan politik terbentuk karena elit politik yang menginginkan manfaat partisipasi yang luas, berupa dukungan bagi mereka sendiri dan bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Bagi banyak elit politik, partisipasi itu paling banter merupakan satu alat dan bukan suatu nilai utama.

4. Perilaku elit politik didefinisikan sebagai aktifitas yang tidak dianggap sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi mempengaruhi, atau berusaha mempengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi serta merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

II. 5. Definisi Operasional

Defnisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamati. Indikator definisis operasional dalam rangka menjelaskan satu permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

II. 5. 1 Perilaku elit politik Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul

1. Perilaku Politik
 - a) Pragmatis
 - b) Akomodatif

- c) Kritis
 - d) Rasional
 - e) Oligarki Elit Partai
2. Pilihan politik
 - a) Patron Klien
 - b) Karisma
 - c) Komunitas keagamaan
 - d) Keputusan Rasional
 - e) Keputusan Pragmatis

II. 5. 2 Kebijakan Dukungan Politik Kepada Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Sri Suryawidati dan Misbakhul Munir Dalam Pemilukada Bantul 2015

1. Aktor pembuat kebijakan
2. Bentuk-bentuk dukungan
3. Keluasan dan keterbatasan dukungan
4. Para pendukung kebijakan

**II. 5. 3 Penolakan Kebijakan Dukungan Politik DPC
PPP Kabupaten Bantul kepada pasangan Sri
Suryawidati dan Misbakhul Munir pada Pemilukada
Bantul 2015**

1. Formasi penolakan
2. Para penolak kebijakan
3. Penolakan terhadap kebijakan politik DPC PPP Bantul
dalam Pemilukada Bantul 2015